

Target Penerimaan Pajak dan Jebakannya

Yustinus Prastowo

yustinus.prastowo@cita.or.id

jpras07@gmail.com

<http://www.cita.or.id>

Pembahasan tentang pajak tak pernah lepas dari target dan pencapaiannya. Hal ini memang penting tapi sebenarnya bukan satu-satunya bahkan bukan yang terpenting. Dalam sebuah sistem perpajakan yang sudah mapan dan mantap, penerimaan pajak merupakan output dari sistem yang ditopang kepatuhan pajak yang tinggi (tax compliance) dan otoritas pajak yang profesional dan kredibel.

Tahun 2015 sebenarnya kita memiliki momentum untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif, mencakup kebijakan dan administrasi perpajakan. Sayangnya, Pemerintah kembali terjebak ke dalam target. Maka riuh rendah dan percakapan soal pajak tak lepas dari pertanyaan “Apakah target penerimaan pajak 2015 akan tercapai?”, bukan “Apakah prasyarat-prasyarat sistem perpajakan yang sustain telah disiapkan dan dibangun?” Maka terjadilah simpang siur yang mengecoh, bahkan berpotensi menyesatkan: keberhasilan proyek membangun sistem perpajakan jatuh dalam kalkulasi matematis, bukan strategi komprehensif.

Target penerimaan pajak 2015 hampir pasti tidak akan tercapai. Saya kira target yang ditetapkan memang terlampau tinggi, ambisius. Kita maklum angka ini jatuh dari langit imajinasi semata-mata untuk menambal kebutuhan jangka pendek: belanja tak mungkin dipangkas sedangkan penerimaan sektor migas turun drastis. Hampir tak ada justifikasi teoretik-empirik yang melambarinya. Sisi belanja menjadi ranah sakral yang tak bisa diusik, padahal di situlah setan gundul bergentayangan.

Jika demikian halnya, menyoal pencapaian target penerimaan berpotensi memutar lagu yang sama dan mengulang kekeliruan yang sama. Repetisi yang justru membuat kita tak beranjak melakukan apa pun. Kemenkeu dan Ditjen Pajak telah mencoba merumuskan beberapa hal dan melakukan berbagai langkah terobosan, namun tetap tak cukup menyelamatkan keadaan. Tahun Pembinaan dan skenario 5 tahunan adalah ide brilian yang patut disempurnakan dan dilanjutkan secara konsisten.

Presiden Jokowi saya kira sudah saatnya membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Perpajakan di tingkat kepresidenan untuk memandu dan memadukan langgam kebijakan dan pemungutan pajak, melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan breakthrough. Target tax ratio 16% di tahun 2019 bukan hal muluk tapi bisa jadi janji belaka. Juga pembentukan badan penerimaan perpajakan, reformasi UU Perpajakan, pengembangan sistem administrasi berbasis IT, peningkatan profesionalitas pegawai – adalah satu tarikan nafas kebijakan reformasi yang harus diwujudkan.

Jika Presiden Jokowi ingin berhasil, visi ini harus dipahami dan diimplementasikan. Sekalipun kita memiliki menteri atau dirjen dengan kualitas mumpuni, jika tidak dipandu oleh visi yang baik dan dibantu mengurai jalan ideologis yang baru, reformasi akan kandas. Satu-satunya jalan yang paling mungkin adalah kembali ke visi Nawacita dan menjalankannya secara konsisten. Saya memimpikannya, semoga Presiden pun masih mengingat mimpi dan janji yang dibuatnya. Dengan senang hati rakyatmu akan membantu sepenuh hati di belakangmu!

Biografi Penulis



Yustinus Prastowo

- Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) Jakarta
- Peneliti Kebijakan Perpajakan pada Perkumpulan Prakarsa
- Alumnus Pascasarjana STF Driyarkara Jakarta

Email :

yustinus.prastowo@cita.or.id
jpras07@gmail.com